

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian memegang peranan penting pada perekonomian nasional. Untuk mengimbangi semakin pesatnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia, maka usaha pertanian yang maju perlu digalakkan kawasan pertanian Indonesia. Dalam upaya membangun pertanian Indonesia agar kualitas dan kuantitas produk pertanian dapat ditingkatkan maka perlu peran pemerintah dalam hal kebijakan pertanian guna pencapaian pemerataan swasembada pangan. Pembangunan sektor pertanian merupakan sektor yang diutamakan terkait dengan kesejahteraan petani.

Indonesia terdiri dari beberapa sektor pertanian yaitu subsektor pertanian rakyat (subsektor tanaman pangan), subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. Tanaman padi termasuk dalam subsektor tanaman pangan dalam sektor pertanian. Padi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di Indonesia beras merupakan makanan pokok dan juga makanan yang mengandung karbohidrat (Mubyarto, 1989:16).

Intensifikasi pertanian yaitu pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Ekstensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka

hutan dan semak belukar, daerah sekita rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Usaha-usaha meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan antara lain dengan cara membangun gudang-gudang, pabrik penggilingan padi dan menetapkan harga dasar gabah, memberikan berbagai subsidi dan insentif modal kepada para petani agar petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya, menyempurnakan sistem kelembagaan usahatani melalui pembentukan kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh pelosok daerah yang bertujuan untuk memberikan motivasi produksi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi para petani.

Mencukupi kebutuhan produksi padi dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan serta pendapatan petani merupakan tujuan yang hendak dicapai Pemerintah. Oleh sebab itu, untuk mengurangi ketergantungan akan impor sangat diperlukan upaya untuk mempercepat peningkatan produksi padi sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan hasil produksi padi dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Namun mengingat sulitnya mencari lahan pertanian dan semakin sempitnya lahan pertanian padi dan laju pertumbuhan penduduk yang besar maka usaha peningkatan produktivitas padi harus ditingkatkan, karena berdampak pada produksi dan pendapatan petani.

Pada saat gabah melimpah terutama pada musim panen raya berlangsung, sering kali timbul permasalahan di bidang pemasaran. Guna mengatur stabilitas harga gabah di pasaran, pemerintah telah menetapkan kebijakan harga dasar gabah sebagai jaminan harga kepada petani agar tetap bergairah

dalam mengusahakan tanaman padi dan terpacu untuk meningkatkan produksi. Harga dasar (*floor price*) yaitu diperlukan untuk menjaga agar harga pasar pada saat panen tidak turun, supaya produsen bisa menerima hasilnya sesuai dengan harga yang ditetapkan tersebut. Banyaknya barang yang ditawarkan, sementara pembeli dan permintaan tetap maka harga akan tertekan. Buruknya penetapan harga ini bisa dijadikan bola bagi tengkulak atau pemodal yang nakal untuk memperoleh keuntungan yang besar. Harga atap (*ceiling price*) yaitu tetap diperlukan khususnya pada musim-musim paceklik, saat persediaan produksi terbatas, Sehingga dengan demikian kebijaksanaan harga dikatakan sangat efektif apabila harga pasar berada di antara harga dasar dan harga atap (Daniel, 2004).

Dari penjelasan di atas dapat kita kaitkan dengan gambaran penduduk Majalengka berdasarkan jenis pekerjaan, dapat ditunjukkan dari sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, seperti pada Tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Penduduk Majalengka Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun  
2006-2010 (%)**

No	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	31,24	37,61	37,53	33,85	37,03
2	Pertambangan dan Penggalian	0,67	0,35	0,42	0,39	0,83
3	Industri Pengolahan	19,39	13,94	13,90	14,73	15,05
4	Listrik, gas dan air minum	0,10	0,24	0,24	0,31	0,17
5	Konstruksi	5,36	5,35	5,50	5,79	5,55
6	Perdagangan	26,65	26,61	26,65	25,16	23,91
7	Angkutan dan Komunikasi	5,80	5,47	5,51	6,33	4,57
8	Keuangan	0,51	1,19	1,25	0,84	0,53
9	Jasa-jasa Lainnya	10,27	9,23	9,00	12,60	12,37

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2011*

Dari tabel di atas bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Majalengka bermata pencaharian sebagai petani. Dengan demikian kesejahteraan petani sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi petani guna

mensejahterakan petani dan memperlancar arus pemasaran hasil panen agar lebih efisien.

Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) berupa penetapan harga pembelian Pemerintah (HPP). Inpres No.5 Tahun 2015 memuat ketentuan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) perkilogram di petani, atau Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perkilogram di penggilingan. Untuk gabah kering giling (GKG) dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG. ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id))

Tingkat produksi padi nasional yang cukup tinggi, penetapan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) tersebut tentu sangat ditunggu petani karena membayangkan kesejahteraan mereka akan ikut naik. Namun jika melihat pengalaman tahun 2009 produksi nasional memecahkan rekor selama

beberapa dekade sebesar 63,84 juta ton gabah kering giling (GKG), tetapi angka nilai tukar petani (NTP) adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase, nilai tukar petani terhadap tanaman pangan agustus 2009 hanya sebesar 95,04 artinya, petani tidak memperoleh profit dari usaha tani karena seluruh pendapatan habis menjadi modal usaha tani. Hal ini di sebabkan akibat harga agro input seperti pupuk, benih, pestisida, dan sewa alat mesin pertanian mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan kenaikan indeks biaya yang dibayar oleh petani dan menurunkan indeks biaya yang diterima dari usaha tani padi. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa pembangunan pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani belum sepenuhnya berhasil. Peningkatan produktivitas yang diupayakan petani melalui penerapan teknologi tidak diimbangi dengan nilai yang memadai, karena harga yang diterima petani relatif rendah (Subandriyo, 2010).

Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan terutama beras, melalui berbagai langkah kebijakan. Di samping itu, dalam rangka mengurangi beban penderitaan petani, kebijakan perberasan di Indonesia hendaknya harus melingkupi bukan hanya pada persoalan-persoalan produksi beras.

Menurut Rasahan (2000) dalam Sutrisno (2010) mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian sub sektor

tanaman pangan terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi beras meliputi: (1) lahan-lahan pertanian umumnya semakin berkurang tanpa diimbangi dengan pengembangan lahan yang seimbang terutama di sekitar kota-kota besar baik di Jawa maupun diluar Jawa, (2) Penguasaan lahan sempit rata-rata kurang dari 0,5 Ha sehingga tidak ekonomis dalam usaha tani, (3) Saat panen raya harga komoditas jatuh antara lain sebagai akibat instrumen harga dasar tidak berjalan dengan baik, (4) Kebijakan makro ekonomi kurang mendukung dan kurang berpihak pada petani dalam menciptakan pembangunan tanaman pangan yang berkelanjutan, (5) Aplikasi teknologi ditingkat usahatani banyak yang tidak sesuai dengan anjuran yang disebabkan oleh tingginya harga sarana produksi dan rendahnya kemampuan permodalan petani, (6) Kondisi iklim kurang mendukung menyebabkan penurunan produksi, dan (7) peranan penyuluh pertanian.

Pengamatan yang dilakukan Arifin (2007) menunjukkan harga gabah dan beras yang semakin melebar sejak kejatuhan Presiden Soeharto menjadi persoalan tersendiri bagi ekonomi perberasan. Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa pada tanggal 1 Februari 2006, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani bulan Januari 2006 tercatat Rp. 1.990,- per kg, sementara harga rata-rata beras kualitas medium seluruh Indonesia Rp. 3.615,- per kg, dengan variasi yang cukup tajam antara Rp. 3.500,- per kg dan Rp. 4.200,- per kg atau bahkan lebih tinggi lagi di daerah pedalaman dan yang terisolasi. Sedangkan tanggal 1 Januari 2010 harga rata – rata gabah kering

panen (GKP) di tingkat petanin tercatat Rp. 2.640,- per kg, sementara harga rata-rata beras kualitas medium seluruh Indonesia Rp. 3.725,- per kg.

Menurut Syahza (2003) disparitas antara harga gabah dan beras yang tinggi merupakan akibat dari panjangnya rantai distribusi komoditas pertanian. Keadaan ini akan menyebabkan besarnya biaya distribusi margin pemasaran yang tinggi, sehingga ada bagian yang harus dikeluarkan sebagai keuntungan pedagang. Kendati pada umumnya petani tidak terlibat dalam rantai pemasaran produk, sehingga nilai tambah pengolahan dan perdagangan produk pertanian hanya dinikmati oleh pedagang. Hal ini cenderung memperkecil bagian yang diterima petani dan memperbesar biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Menurut Rachman (1997) dalam Agustian dan Setiadjie (2008) antar daerah dan komoditas, kelembagaan yang terlibat dalam distribusi produk pertanian seringkali terdapat perbedaan. Secara umum mereka yang terlibat dalam pemasaran adalah pedagang pengumpul, para penyalur, pedagang besar yang beroperasi di pusat-pusat pasar, dan akhirnya pengecer di daerah konsumsi itu sendiri yang berhadapan langsung dengan konsumen. Berbeda dengan produk pertanian gabah dan beras, menurut Arifin dan Natawidjaja (2000) dalam Tambunan (2008) bahwa di banyak wilayah ada dua jalur pemasaran dalam tata niaga beras, yaitu swasta dan pemerintah (Bulog). Jalur swasta lebih panjang daripada jalur pemerintah dengan banyak pemain yang diawali dengan pengumpul-pengumpul di desa, perusahaan-perusahaan penggilingan padi, grosir dan berakhir oleh pedagang-pedagang eceran.

Sistem distribusi komoditas padi ternyata bervariasi dalam tingkat kompleksitasnya antar wilayah atau antar kelompok wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi dan Beras Di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka masalah pokok yang dikemukakan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pola distribusi komoditas padi dan beras mulai dari petani sampai ke konsumen akhir di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka?
- 2) Seberapa besar margin keuntungan yang diterima masing-masing pelaku pemasaran dalam rantai distribusi komoditas padi dan beras di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diambil dari penelitian ini maka, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi pola distribusi komoditas padi dan beras mulai dari petani sampai ke konsumen akhir di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

- 2) Mengidentifikasi margin keuntungan yang diterima masing-masing pelaku pemasaran dalam rantai distribusi komoditas padi dan beras di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk berbagai pihak :

- 1) Kepentingan akademis, dapat memberikan tambahan informasi dalam wacana akademik yang berkaitan dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi perdagangan internasional dan ekonomi pertanian, sehingga dapat dijadikan masukan, referensi serta perkembangan dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- 2) Kepentingan Praktis, diharapkan dapat membantu pihak-pihak perumus ataupun bagi para pengambil keputusan di pemerintah yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.
- 3) Untuk Penulis, untuk melengkapi program perkuliahan S1, program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan dan sebagai salah satu media latihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin yang dipelajari.